

## Bali Bakal Prioritaskan Kendaraan Listrik di Kawasan Wisata

DENPASAR (IM) - Gubernur Bali, I Wayan Koster mengatakan pihaknya akan memprioritaskan penggunaan kendaraan listrik di kawasan pariwisata mulai 2023.

“Daerah tujuan wisata ini akan menjadi prioritas mulai tahun 2023 untuk menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai, baik sepeda motor maupun mobil,” ucap Koster dalam seminar tentang kendaraan listrik di Jakarta, Kamis (29/9).

Koster mengatakan daerah wisata yang masuk zonasi penerapan kendaraan listrik adalah Nusa Dua, Kuta, Sanur, Denpasar, Ubud, Gianyar, dan Nusa Penida.

Lebih lanjut Koster menilai penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di daerah wisata akan meningkatkan citra Bali di mata pelancong internasional.

Citra Bali sebagai wilayah yang mengedepankan penggunaan energi baru terbarukan juga makin meningkat seiring digunakannya kendaraan listrik pada gelaran Presidensi G20 yang akan dihelat di Pulau Dewata pada November mendatang.

Terkait hal tersebut,

Koster berharap nantinya kendaraan listrik yang digunakan dalam Presidensi G20 di Bali bisa terus berada di pulau tersebut sebagai bentuk keseriusan penggunaan kendaraan listrik yang berkelanjutan.

“Ini kami sudah ajukan permohonan supaya (kendaraan listrik) itu ditinggal di Bali, bisa dibuatkan skema yang meringankan,” ucap dia.

Koster kemudian menuturkan bahwa banyak keuntungan yang diperoleh dengan bermigrasi ke kendaraan listrik, seperti perawatan yang lebih mudah, hadirnya udara yang lebih bersih, serta pengeluaran biaya yang lebih hemat dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.

Dia telah menginstruksikan para pegawainya untuk mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai.

Selain itu, dirinya juga mendorong anak-anak muda di Bali untuk beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan tersebut.

“Kami akan buat skema dengan lembaga keuangan dan juga industri supaya itu lebih menarik bagi para anak-anak muda kita,” ucap dia. ● pra

# 8 | Nusantara

IDN/ANTARA



**DELEGASI 3RD SHERPA MEETING G20 KUNJUNGI CANDI BOROBUDUR**  
Delegasi 3rd Sherpa Meeting G20 Indonesia mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/9). Kunjungan wisata peserta 3rd Sherpa Meeting G20 tersebut untuk memperkenalkan destinasi wisata di Indonesia.

## Bendungan Ciawi dan Sukamahi Ditarget Selesai Desember 2022

Kementerian PUPR terus memacu penyelesaian konstruksi kedua bendungan tersebut, sehingga sebelum musim penghujan, Bendungan Ciawi dan Sukamahi diharapkan bisa siap meminimalisasi banjir, terutama mengendalikan serta meminimalisasi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

tober atau November target kami selesai,” kata Jarot.

Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6,05 juta m3 dan luas area genangan 39,40 hektare untuk mereduksi banjir sebesar 111,75 meter kubik/detik.

Kontrak pembangunannya senilai Rp798,70 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya dan PT Sacna (KSO).

Sedangkan Bendungan Sukamahi memiliki daya tampung 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 hektare dengan manfaat mereduksi banjir sebesar 15,47 meter kubik/detik.

Pembangunan Bendungan Sukamahi sudah direncanakan sejak 1990-an dan mulai dibangun pada 2017.

Kontrak pembangunannya senilai Rp464,93 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya-Basuki KSO.

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan Bendungan Kering Ciawi dan Sukamahi dalam rangka meningkatkan kapasitas pengendalian banjir Jakarta.

Menteri PUPR mengatakan bahwa sebagai bendungan kering bisa siap meminimalisasi banjir, terutama mengendalikan serta meminimalisasi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

**JAKARTA (IM)** - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menargetkan pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi dapat selesai pada akhir tahun ini, sehingga bisa meminimalisasi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Mengenai progres Bendungan Ciawi dan Sukamahi, Insya Allah mohon doanya kurang lebih Oktober atau November selesai,” ujar Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR, Jarot Widjoko dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/9).

Kementerian PUPR terus memacu penyelesaian konstruksi kedua bendungan tersebut, sehingga sebelum musim penghujan, Bendungan Ciawi dan Sukamahi diharapkan bisa siap meminimalisasi banjir, terutama mengendalikan serta meminimalisasi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Sebelum musim hujan, Ok-

Sementara pada musim kemarau bendungan ini kering.

Sebelumnya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Heri Mulyono, mengatakan proses pembangunan dua proyek nasional dam kering (dry dam) di Jawa Barat (Jabar), yakni Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sudah hampir 90 persen.

Dia mengatakan kendala dalam proses finishing adalah curah hujan tinggi yang membuat sebagian bangunan dam kering tertimbun tanah, sehingga harus mengontrol kadar airnya secara ketat.

“Kami selalu berkoordinasi untuk berbagai macam masalah yang ada di sini, termasuk untuk lahan terbuka termasuk untuk penggunaan jalan akses di depan. Kami selalu koordinasi dengan warga sekitar dan tentunya dengan pemerintah setempat kita selalu berkoordinasi,” kata Bambang.

Bendungan kering adalah bendungan yang dibangun khusus untuk mengontrol banjir.

Biasanya tanpa turbin dan pintu air untuk membiarkan aliran sungai mengalir dengan bebas selama kondisi normal dan pada saat curah hujan tinggi, bendung akan menahan kelebihan air dan mengalirkan secara terkontrol. ● pp



bappendabogorkab bappenda\_kabbogor bappendakabbogor bappendajura

## Capaian Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2022

**PENINGKATAN** Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD turut menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor terus berupaya dalam mengembangkan potensi penerimaan PAD di Wilayah Kabupaten Bogor demi meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan, khususnya dalam pengelolaan Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pajak Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintah dalam rangka penanganan dan pemulihan dampak ekonomi daerah akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor.

Tanggal 31 Agustus 2022 merupakan waktu jatuh tempo bagi Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Tahun 2022. Namun sampai dengan 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun 2022, masih melaksanakan relaksasi pajak daerah sebagai salah satu upaya untuk meringankan masyarakat melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga diharapkan penerimaan PBB P2 masih terus meningkat sampai dengan akhir tahun ini.

Bappenda Kabupaten Bogor berupaya terus dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Daerah dengan cara meningkatkan pelayanan dan mengembangkan inovasi-inovasi guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Kerjasama dengan Bank Jabar Banten (BJB) melalui Aplikasi Pembayaran Pajak, merupakan salah satu inovasi yang baru dilakukan dan sudah dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2022. Aplikasi pembayaran pajak berupa sistem pembayaran QRIS Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah suatu sistem yang berlaku di Indonesia dan dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) serta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) beberapa waktu lalu, dengan tujuan untuk mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang luas serta mengakomodasi kebutuhan transaksi keuangan secara nasional. Bjb DigiCash salah satu yang elektronik serba guna keluaran bank bjb juga dapat digunakan untuk bertransaksi di gerai-gerai berlogo Qris tersebut. Cara penggunaan bjb DigiCash di gerai berlogo QRIS ini sangat mudah, pengguna tinggal melakukan pemindai QRIS melalui aplikasi bjb DigiCash atau bjb DIGI. Syaratnya, dengan memastikan terlebih dahulu saldo electronic money pengguna mencukupi. Untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PBB P2, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor melalui BJB membuat sebuah barcode atau QR (Quick Response) Code yang akan discan setiap akan melakukan transaksi pembayaran dan disebarkan di 10 (sepuluh) UPT Pajak Daerah Kelas A.

Hampir semua jenis pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan untuk pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah Triwulan III (s.d 26 September) Tahun Anggaran 2022. Bappenda Kabupaten Bogor mencatat pajak daerah mulai meningkat di tahun 2022 setelah pandemi semakin melandai dan kasus Covid-19 menurun.

Penerimaan realisasi pajak daerah di Kabupaten Bogor dari 10 jenis pajak yang dikelola Bappenda Kabupaten Bogor, paling besar berkontribusi dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) dengan capaian Rp 651.997.052.251,00. Kedua terbesar dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan capaian Rp 537.579.408.782,00 dan ketiga Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 244.450.969.043,00 sebagaimana tergambar pada grafik realisasi pajak daerah Triwulan III (s.d 26 September) Tahun 2022 dibawah.



Capaian realisasi penerimaan 10 jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Bappenda Kabupaten Bogor sampai dengan tanggal 26 September 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III (s.d 26 September 2022)				
No	Jenis Pajak	Target 2022 (Rp)	Realisasi (Rp) 26 Sept 2022	Persentase Capaian (%)
1	Pajak Hotel	100.392.198.000	89.572.520.164	89,22 %
2	Pajak Restoran & Sejenisnya	180.579.809.000	195.623.585.576	108,33 %
3	Pajak Hiburan	42.194.590.000	47.285.802.248	112,07 %
4	Pajak Reklame	20.001.086.000	16.858.818.097	84,29 %
5	Pajak Penerangan Jalan	289.206.000.000	244.450.969.043	84,52 %
6	Pajak Parkir	12.511.988.000	10.604.087.509	84,75 %
7	Pajak Air Tanah	70.062.497.000	54.788.406.485	78,20 %
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	120.725.032.000	89.872.606.929	74,44 %
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	574.049.109.000	537.579.408.782	93,65 %
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	790.728.750.000	651.997.052.251	82,46 %

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappenda Kabupaten Bogor tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari masih rendahnya pemahaman masyarakat, wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk dapat membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah, berpotensi menjadi tunggakan/piutang pajak daerah. Oleh karena itu Bappenda Kabupaten Bogor melakukan rencana aksi dalam penagihan Piutang Pajak Daerah sebagai upaya percepatan penerimaan Pendapatan Daerah yaitu dengan cara mengadeng dan melakukan kesepakatan bersama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut meliputi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya;
2. Bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam rangka terjadi sengketa atau perselisihan antar pemerintah serta bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama.

hal tersebut dilakukan untuk mempermudah Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perajakannya setelah melalui mekanisme proses Penagihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku.

Kebijakan Perpanjangan Relaksasi Pajak Daerah yang masih berlangsung dan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak pada tahun 2022 yaitu:

**untuk PBB-P2 s.d tahun pajak 2017**  
**Pengurangan pokok 20% + Penghapusan denda periode bayar 3 Januari - 31 Desember 2022**

Kebijakan tersebut merupakan salah satu inovasi daerah dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah yang bertujuan meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perajakannya secara berkesinambungan.

Dengan adanya kebijakan relaksasi pajak daerah, setiap Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Bogor dapat memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak daerah tersebut. Pembayaran pajak daerah dapat dilakukan di Kantor Bappenda Kabupaten Bogor, UPT Pajak Daerah Kelas A Bappenda yang tersebar di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten Bogor, Bank BRI, Bank BJB, Pos Indonesia, Alfamart, Indomaret, tokopedia dan bukalapak.

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap di Tahun 2022 saat ini perekonomian akan lebih tinggi lagi dimana pada tahun 2021 kemarin pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan, karena dengan tumbuhnya perekonomian khususnya di Kabupaten Bogor, akan berdampak pada peningkatan pembangunan Wilayah Kabupaten Bogor dari sektor Perpakajian. Dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah maka pembangunan daerah akan dapat berjalan dengan baik dan karsa Bogor Maju akan terwujud sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sesuai dengan Visi “*Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadilan*” (adv)

## Tenaga Honorer Harus Tetap Ikuti Seleksi Agar Menjadi P3K

**BANDUNG (IM)** - BKPSDM Kota Bandung meluruskan, bahwa pendataan tenaga honorer saat ini tidak serta merta akan otomatis diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Ini tidak betul soal kabar tenaga honorer yang saat ini kita data, otomatis diangkat menjadi P3K. Mereka tetap harus mengikuti seleksi penerimaan aparatur sipil negara (ASN),” kata Kepala BKPSDM Kota Bandung, Adi J Mustafa, Kamis (29/9).

Adi J Mustafa menjelaskan, seleksi menjadi P3K sama sulitnya dengan seleksi CPNS. Selain itu, syarat menjadi P3K harus memiliki akumulasi pengalaman kerja minimal tiga tahun di bidangnya.

“P3K memang sama dengan PNS, hanya PNS tidak dibatasi kontrak. Kalau P3K waktu per lima tahun, dan dalam satu tahun sekali ada evaluasi. Kalau mereka tidak sesuai kriteria penilaian, bisa saja diputus kontraknya,” ucapnya.

Terkait kekhawatiran terdapat pegawai tidak bekerja namun ma-

suk ke dalam pendataan non ASN, peluang tersebut dikemukakan Adi sangatlah kecil.

Sebab harus memenuhi persyaratan bekerja lebih dari satu tahun.

“Makanya kekhawatiran di lapangan ada orang tidak kerja, tiba-tiba masuk, datanya itu sangat kecil. Jumlah P3K sudah mencapai 3.000 orang lebih, dan mayoritas dari mereka adalah guru. Baik itu guru swasta dan negeri, bahkan ada kepala sekolah swasta,” ujar dia. ● pra

## Pemkab Bogor Klaim Bagi Hasil Pajak 2021 Sudah Sesuai Hak dan Potensi Desa

**CIBINONG (IM)** - Pemkab Bogor memastikan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 70 tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) merupakan komitmen untuk memberikan BHPRD sesuai hak dan potensi di masing-masing desa. Sehingga, tidak ada desa yang merasa dirugikan.

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor, Gandi Putra Siregar mengatakan BHPRD bersumber dari 10 komponen pajak daerah dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Menurut Gandi Putra Siregar, BHPRD dihitung dengan mempertimbangkan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada masing-masing desa.

Artinya, penerimaan BHPRD oleh desa sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi PBG di desa terkait. “Sehingga penerimaan BHPRD tidak akan selalu sama untuk setiap tahun, bisa bertambah atau berkurang dibanding penerimaan tahun sebelumnya,” kata Gandi Putra Siregar, ke-

marin. Ia menuturkan bahwa BHPRD dihitung berdasarkan penerimaan pajak dan retribusi di tahun sebelumnya sebesar 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi setelah dikurangi biaya insentif 5 persen dalam hal tercapai target.

Komposisinya, 60 persen dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40 persen dibagi secara proporsional.

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, BHPRD yang dibagikan pada Tahun 2022 adalah yang tertinggi.

Bappenda juga telah melakukan evaluasi dengan penghitungan ulang secara keseluruhan yang totalnya mencapai Rp222.435.091.990. Artinya, meningkat sebesar Rp56.280.433.281 jika dibandingkan pada Tahun 2021.

“Jadi ditetapkannya Perbup Bogor Nomor 70 tahun 2022 adalah agar setiap desa mendapatkan BHPRD sesuai haknya berdasarkan potensi di masing-masing desa, sehingga tidak ada desa yang dirugikan.

Setelah kami evaluasi memang ada yang perlu dikoreksi. Pemda tetap berkomitmen pendistribusian BHPRD ini ses-

uai haknya, sehingga tidak ada yang dirugikan,” tuturnya.

Ke depan, Gandi Putra Siregar menjelaskan Bappenda juga bakal membuat aplikasi perhitungan BHPRD sehingga desa bisa mengakses dengan mudah. Sementara untuk meningkatkan pendapatan daerah, desa juga diharapkan ikut aktif mengenal potensi pajak dan retribusi daerah.

“Kami berharap aplikasi perhitungan BHPRD mudah diakses dan meningkatkan pendapatan desa maupun daerah, aparatir desa juga bisa melaporkan adanya potensi pajak daerah di wilayah desa kepada pengelola pajak daerah dan mengimbau para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan daerahnya,” jelas Gandi sapaan akrabnya.

Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah meminta para kepala desa (Kades) untuk melengkapi persyaratan pencairan BHPRD 2022.

Tujuannya, agar BHPRD bisa segera dicairkan dan pemerintah desa bisa menggunakannya dengan maksimal. ● gio